

ANALISIS EKONOMI WILAYAH DAN KEUANGAN DAERAH REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

Windo Sinurat¹, Andar Sitohang², Manaor Silitonga³, Josua Alexander Gultom⁴,
Mutiha Tahi Parulian Hutahaean⁵, Mananda Ture Siburian⁶
^{1,2,3,4,5,6}Akademi Teknik Deli Serdang

Email: windosinurat64@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan potensi masing-masing sektor ekonomi dengan mengetahui sektor apa saja yang berbasis yang tumbuh relatif cepat di Kabupaten Toba. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan menganalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tehnik analisis Analisis Static Location Quotient (SLQ), Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ), Analisis Gabungan SLQ dan DLQ, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah Sektor potensial kuadaran II yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, Konstruksi, Penyediaan akomodasi, Administrasi pemerintahan dan Jasa pendidikan memiliki potensi (unggul) tetapi tidak progresig tidak melaju signifikan.

Kata Kunci: RTRW, Ekonomi Wilayah, Potensi Sektor Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Toba merupakan Kawasan strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang merupakan merupakan sebuah langkah reformasi dibidang Penataan Ruang yang cukup signifikan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan Peningkatan diri sesuai dengan potensi sumberdaya karakteristik dan budaya (Kearifan Lokal). Kabupaten Toba juga merupakan kawasan strategi kawasan Danau Toba yang di amanatkan pada peraturan presiden nomor 81 tahun 2024.

Dalam Rangka mengarahkan pembangunan di Kabupaten Toba dengan mewujudkan Visi Misi Bupati Kabupaten Toba yaitu Mewujudkan Toba Unggul dan Bersinar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keharmonisan lingkungan dan keterpaduan fungsi ruang dan fungsi lahan yang jauh berbeda dari fungsi sebelumnya serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.

PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 5.249.252 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2022 sebesar 5.888.376 juta rupiah. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toba menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun cenderung fluktuatif (Kabupaten Toba

Dalam Angka 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah baik pendapatan asli maupun pendapatan pusat mengalami kenaikan dan penurunan yang dipengaruhi covid 19 dan dipengaruhi juga pengembangan potensi yg ada tidak maksimal. Beberapa sektor di kabupaten Toba yang memiliki potensi di kabupaten Toba yaitu sektor pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa.

Sistem pusat pelayanan baik di dalam arahan nasional maupun arahan provinsi kabupaten Toba terutama ibu kota Balige di amanatkan menjadi pusat kegiatan wilayah khususnya di bidang ekonomi. Kabupaten Toba memiliki kegiatan yang berbasis ekonomi yg di dalam nya dapat di kembangkan yaitu sektor pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa. Yang menjadi pertanyaan apakah Kabupaten Toba memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung mengembangkan kegiatan-kegiatan potensial sesuai yang di amanatkan di peraturan yang tersebut di atas.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data diperoleh dari lembaga atau instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistika Kabupaten Toba. Pendekatan analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik penelitian deskriptif kuantitatif adalah pendekatan analisis data yang menggunakan data berupa angka atau nilai, yang kemudian dievaluasi dengan menambahkan informasi berupa frase untuk menjelaskan data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis teknik analisis Analisis Static Location Quotient (SLQ), Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ), Analisis Gabungan SLQ dan DLQ, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

2.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Metode location quotient (LQ) dibedakan menjadi dua, yakni: static location quotient (SLQ atau LQ) dan dynamic location quotient (DLQ). Dasar penggunaan teknik LQ adalah teori ekonomi basis di mana ketika industri basis itu menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah dan di luar daerah maka penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan pendapatan ke daerah yang bersangkutan. Masuknya arus pendapatan akan menyebabkan naiknya konsumsi dan investasi sehingga pendapatandaerah dan kesempatan kerja ikut meningkat pada gilirannya.

A. Analisis Static Location Quotient (SLQ)

Berdasarkan analisis Static location quotient (SLQ):

- Jika $LQ=1$, tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.
- Jika $LQ>1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan.
- Jika $LQ<1$, disebut sektor nonbasis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah acuan.

Sektor basis dan non basis dengan ketentuan, sebagai berikut

- a. $LQ > 1$ artinya sektor tersebut menjadi basis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan memiliki keunggulan komparatif, produksinya mampu memenuhi kebutuhan di Kabupaten Toba hingga diekspor ke luar wilayah.

- b. $LQ = 1$ artinya sektor tersebut tergolong sektor basis. Produksinya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Toba saja dan tidak mampu untuk diekspor ke luar wilayah.
- c. $LQ < 1$ artinya sektor tersebut termasuk sektor non basis. Produksinya belum dapat memenuhi kebutuhan di dalam wilayah, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

B. Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Perubahan perekonomian lokal pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Quotient (DLQ) sehingga perubahan sektoral dapat diketahui. DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi sektor atau sub sektor dari waktu ke waktu. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda. Nilai DLQ > 1 atau samadengan 1, sektor i dapat diharapkan untuk unggul dimasa yang akan datang, dan jika $DLQ < 1$ maka sektor i tidak dapat diharapkan unggul di masa yang akan datang.

C. Analisis Gabungan SLQ dan DLQ

Penggabungan antara nilai SLQ dan DLQ dapat dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan tertinggal. Ada pun kriteria yang digunakan sebagai berikut (Suyatno, 2000):

- a. Jika nilai SLQ dan DLQ > 1 , berarti sektor tersebut akan tetap menjadi basis baik sekarang maupun di masa datang.
- b. Jika nilai SLQ > 1 dan DLQ < 1 , itu artinya sektor tersebut akan bergeser dari sektor basis menjadi non basis di masa datang.
- c. Jika nilai SLQ < 1 dan DLQ > 1 , maka sektor tersebut akan bergeser dari sektor non basis menjadi sektor basis di masa datang.
- d. Jika nilai SLQ dan DLQ < 1 , maka sektor tersebut akan terus menjadi non basis baik saat ini maupun di masa datang

2.2 Rasio Kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Pusat Alokasi Umum dan Dana Pusat Alokasi Khusus, Dana Pusat Darurat dan Dana Pusat Pinjaman (Widodo, 2001:262). Adapun Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya

2.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat pada rumus dan tabel berikut.

$$RDD : \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

RDD : Rasio Derajat Desentralisasi

PAD_t : Total PAD

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun

2.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KKD : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah

PT : Pendapatan Transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 5.249.252 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2022 sebesar 5.888.376 juta rupiah. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toba menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan dibandingkan tahun 2018. Ada beberapa lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi, artinya nilai PDRB atas dasar harga konstan 2022 di beberapa lapangan usaha lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun pertumbuhan beberapa lapangan usaha lainnya menunjukkan nilai positif. Berikut hasil dan pembahasan teknik analisis Analisis Static Location Quotient (SLQ), Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ), Analisis Gabungan SLQ dan DLQ, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

3.2 Analisis Static Location Quotient (SLQ)

Sektor-sektor yang mempunyai LQ>1 dan digolongkan sebagai sektor basis Kabupaten Toba adalah sektor Pertanian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalan, dan Adm. Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Jasa Pendidikan. Keempat

sektor ini merupakan sektor yang memiliki keunggulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan di dalam Toba khususnya Umumnya pemenuhan kebutuhan pada Provinsi Sumatera Utara serta mempunyai potensi untuk diekspor ke daerah di luar Provinsi Sumatera Utara. Keunggulan ketiga sektor tersebut tercermin dari aktivitas utama di Kabupaten Toba masih luasnya lahan produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan

3.3 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis DLQ setiap sektor di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan DLQ Kabupaten Toba

No	Lapangan Usaha	DLQ	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture Forestry and Fishing</i>	0,01	Tidak Prospektif
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,22	Tidak Prospektif
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,59	Tidak Prospektif
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and gas</i>	0,03	Tidak Prospektif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply Sewerage Waste Management and Remediation Activities</i>	0,02	Tidak Prospektif
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	0,17	Tidak Prospektif
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	0,05	Tidak Prospektif
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,12	Prospektif
9	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,15	Tidak Prospektif
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,04	Tidak Prospektif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,03	Tidak Prospektif
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,02	Tidak Prospektif
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,02	Tidak Prospektif
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,02	Tidak Prospektif
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,05	Tidak Prospektif

No	Lapangan Usaha	DLQ	Keterangan
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0	Tidak Prospektif
17	Jasa lainnya/Other Services Activities	0,02	Tidak Prospektif

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki $DLQ > 1$ adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai DLQ 1,12.

3.4 Analisis Gabungan SLQ dan DLQ

Tabel 2. Gabungan SLQ dan DLQ Kabupaten Toba

Kriteria	DLQ > 1	DLQ < 1
SLQ > 1	Kuadran I Unggul dan Progresif: 1. Sektor unggulan pada SLQ dan DLQ tidak terdapat	Kuadran II Unggul Tidak Progresif: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Konstruksi; 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 5. Jasa Pendidikan
SLQ < 1	Kuadran III Bukan Basis Tapi Progresif : 1. Transportasi dan Pergudangan	Kuadran IV Bukan Basis dan Tidak Progresif: 1. Pertambangan dan Penggalan 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Listrik dan Gas 4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6. Informasi dan Komunikasi 7. Jasa Keuangan dan Asuransi 8. Real Estate 9. Jasa Perusahaan 10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11. Jasa lainnya

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bawah :

1. Kuadran I : menggambarkan sektor yang unggul dan progresi tidak terdapat pada kabupaten toba;

2. Kuadran II : unggul dan tidak progresif artinya terdapat sektor unggulan akan tetapi tidak memiliki nilai yang progresif atau dapat berkembang dengan pesat, dalam kondisi tersebut arahan pengembangan dan pembangunan daerah dapat difokuskan pada lidang sektor ini;
3. Kuadran III : bukan basis tapi progresif, sektor transportasi dan pergudangan memiliki nilai yang progresif tetapi bukan basis atau sektor unggulan di kabupaten toba, hal ini menandakan bahwa keberadaan aktivitas transportasi wilayah pada kabupaten toba cukup tinggi disebabkan oleh kabupaten toba merupakan perlintasan antara wilayah dan terakses oleh jaringan jalan nasional;
4. Kuadran IV : bukan basis dan tidak progresif, merupakan sektor-sektor yang tidak memiliki nilai yang sangat rendah dan tidak dapat menjadi unggulan dan tidak progresif

3.5 Profil Keuangan Daerah

Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, selain ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, juga dipengaruhi oleh sumber dana yang memadai, yaitu bersumber pada penerimaan daerah, dan selanjutnya direalisasikan untuk berbagai kegiatan baik yang menyangkut kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Daerah Kabupaten Toba mencapai 1.020.138.649,559 ribu rupiah, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sumber penerimaan terbesar adalah dari bagian pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tercatat sebesar 939.826.648.146 ribu rupiah, kemudian dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 73.253.546.380 ribu rupiah, dan Pendapatan Lain-lain sebesar 7.058.455.033 ribu rupiah.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupate Toba Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018-2021

No	Jenis Penerimaan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	180.623.184.132	82.511.215.004	67.421.445.590	69.049.797.703	73.253.546.380
2	Dana Perimbangan	687.073.812.253	721.122.884.564	641.789.196.936	921.861.287.336	939.826.648.146
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	236.595.482.912	271.558.900.711	73.378.767.034	-	7.058.455.033
Jumlah Total Penerimaan		1.104.292.479.297	1.075.193.000.279	782.589.409.560	990.911.085.039	1.020.138.649.559

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

3.6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai Pembangunan.

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25-50%
Sedang	50-75%
Tinggi	75-100%

Sumber : *Keppmendagri No.690.900.327 Tahun 1996*

Tabel 4. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Toba Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018–2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Transfer	Rasio Kemandirian	Keterangan
2018	180.623.184.132,37	687.073.812.253	26%	Rendah
2019	82.511.215.004,06	721.122.884.564	11%	Rendah Sekali
2020	67.421.445.590,28	641.789.196.936	10%	Rendah Sekali
2021	69.049.797.702,62	921.861.287.336	7%	Rendah Sekali
2022	73.253.546.379,93	939.826.648.146	7,8%	Rendah Sekali

Sumber : *Hasil Analisis Tahun 2023*

Berdasarkan uraian dan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah selama empat tahun Kabupaten Toba memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah sekali dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian dari tahun 2018 memiliki rasio 26% dan pada tahun 2022 semakin menurun dengan rasio kemandirian 7,8%. hal ini menunjukkan Rasio kemandirian yang masih rendah sekali, mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toba dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial dan Unit Keuangan lainnya.

3.7 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).

Tabel 5. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Toba mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami Kenaikan walaupun relatif kecil, Sehingga rata rata Derajat Desentralisasi adalah 12,82 %. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Toba masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 10,01-20,00 yaitu sebesar 12,82% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Toba masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	TPD	RDD (%)	Kempuan Keuangan
2018	1.104.292.479.297,17	180.623.184.132,37	6,11	Sangat Kurang
2019	1.075.193.000.279,06	82.511.215.004,06	13,03	Kurang
2020	782.589.409.560,28	67.421.445.590,28	11,61	Kurang
2021	990.911.085.038,62	51.046.180.936,17	19,41	Kurang
2022	1.020.138.649.559,33	73.253.546.379,93	13,93	Kurang

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

3.8 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.

Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM, kriteria penilaian ketergantungan menggunakan skala interval sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Tabel 8. Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
2019	721.122.884.564	1.075.193.000.279,06	67,07	Sangat Tinggi
2020	641.789.196.936	782.589.409.560,28	82,01	Sangat Tinggi
2021	921.861.287.336	990.911.085.038,62	93,03	Sangat Tinggi
2022	939.826.648.146	1.020.138.649.559,33	92,13	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan uraian dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa hasil Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Kabupaten Toba pada tahun 2021 sebesar 8% dikategorikan ketergantungannya sangat tinggi. Rata-rata persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Toba selama tahun 2019-2022 rata-rata sebesar 66,97% dikategorikan ketergantungannya sangat tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Toba masih tinggi terhadap pemerintah pusat maupun provinsi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sektor potensial kuadaran II yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, Konstruksi, Penyediaan akomodasi, Administrasi pemerintahan dan Jasa pendidikan memiliki potensi (unggul) tetapi tidak progresig tidak melaju signifikan.
2. Sektor potensial kuadaran II yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, Konstruksi, Penyediaan akomodasi, Administrasi pemerintahan dan Jasa pendidikan tidak mampu di kembangakan oleh pemerintah daerah karena tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang No 26 tahun 2007 *tentang Penataan ruang*
- [2] Peraturan presiden nomor 81 tahun 2024 *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*
- [3] Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996
- [4] Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP YKPN
- [5] Hendrati, I. M. (2018). *Analisis Potensi Investasi Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (M. Prof. Dr. Djohan Mashudi, Ed.)*
- [6] Putra, M. F. (2011). *Studi Kebijakan Publik dan Pemerintahan dalam Perspektif Kuantitatif*(Cetakan Pe). Universitas Brawijaya (UB) Press.
- [7] Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers.
- [8] Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara
- [9] Suyatno, 2000. *Analisa Econimic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan*

- UU No. 25/1999. Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1. No. 2. Hal. 144-159. Surakarta: UMS.
- [10] Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. daerah. Yogyakarta: BPFE.